

KONSEP DAN ISU GENDER DALAM ISLAM

Aminuddin Lubis

Dosen Tetap STAIS Al Hikmah Medan Sumatera Utara
Jln. Pancing/ Mesjid NO.1 Medan Estate, 20227
e-mail: aminuddinlubislubis@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan isu gender dalam islam, dengan menggunakan metode analisis deskriptif penulis akan mendeskripsikan perbincangan dalam konsep gender yang terdapat dua isu utama. Isu yang pertama tentang ketimpangan gender dan isu yang kedua tentang kesetaraan gender. Penyebab terjadinya ketimpangan dan diskriminasi terhadap wanita ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: bahwa konsep ini dianggap doktrin ajaran keagamaan, faktor budaya patriarki, amalan budaya masyarakat dan faktor hegemoni negara. Namun islam sebagai Rahmatan lil ‘alamin telah membawa kaum wanita kepada tempat yang sangat mulia sehingga wanita sama dalam bentuk ketaqwaan dan nilai ibadah di sisi Allah, walaupun terdapat beberapa perbedaan diantara laki-laki dan perempuan bukanlah atas faktor diskriminasi akan tetapi suatu kemuliaan dan bersifat adil yang bermaksud menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Kata Kunci: gender, feminisme, islam

Pendahuluan

Pengertian gender tercatat dalam Kamus Inggris Indonesia yaitu sebagai jenis kelamin (Kamus Inggris Indonesia, 1993: 265). Begitu juga yang dicatatkan di dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, perkataan gender di maksudkan sebagai jantina. Ia juga didefinisikan sebagai golongan jenis kata dalam tatabahasa sesuatu bahasa seperti maskulin, feminis dan neuter (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005: 457). Manakala perkataan jantina pula bermaksud jenis kelamin (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005: 457). Menurut Corsini, gender diartikan

sebagai aspek-aspek sosial atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan seks. Ia mengambil kepada sifat maskulin (*masculinity*) dan feminin (*femininity*) yang dipengaruhi dengan kebudayaan, simbolik, stereotaip dan pengenalan diri (Raymond J. Corsini, 1999: 405).

Terdapat perbedaan diantara jantina dan gender. Jantina adalah klasifikasi biologi manusia menurut organ produksi yang sedia ada, sementara gender pula merupakan klasifikasi sosial yang memperjelaskan tindakan tingkah laku serta peranan yang harus dimainkan oleh seorang laki-laki dan wanita mengikut ketetapan masyarakat tersebut (Zulkifli Ahmad, 2000). Jelaslah terdapat hubungan yang amat rapat di antara jantina dan gender. Kebanyakan tafsiran mengenai tanggungjawab dan hak di antara laki-laki dan wanita dalam masyarakat banyak dikaitkan dengan fungsi biologi mereka sebagai manusia laki-laki dan wanita.

Menurut klasifikasi gender, secara umumnya laki-laki dianggap sebagai manusia yang gagah perkasa, tidak emosional dan senantiasa rasional, mempunyai daya kepemimpinan yang berwibawa dan menggemari aktivitas aktif dan menantang. Sementara wanita justru sebaliknya iaitu bersifat lemah lembut, senantiasa menarik dan anggun menawan, pintar memasak dan mengemas rumah, mudah dipengaruhi oleh emosi, efektif dalam membantu tapi kurang berupaya memimpin dan lebih meminati aktivitas dalaman. Tanggapan umum melihat bahwa dalam sebuah rumahtangga pula, Suami dan bapak adalah pemimpin sementara isteri dan ibu berperanan sebagai pembantu dan pengikut yang setia.

PEMBAHASAN

Isu-Isu Gender Dalam Islam

Mengenai isu gender biasanya yang menjadi bahan perbincangan adalah tentang ketimpangan (bias) dan kesetaraan gender. Isu bias banyak berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan. Ajaran dalam agama selalu dianggap sebagai akar kepada segala ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan, sedangkan kenyataannya bukanlah seperti demikian, melainkan suatu amalan budaya atau tradisi masyarakat yang terkadang lari dari konsep ajaran Islam yang sebenarnya.

Dalam interaksi syariat Islam dengan adat atau budaya masyarakat setempat, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan. Antaranya, memakai amalan budaya yang baik, menolak amalan budaya yang buruk, memperbaiki amalan budaya masyarakat setempat dan sebagainya. Dalam interaksi ini, golongan ulama atau muballigh banyak berkompromi dengan adat dan tradisi setempat. Hasil interaksi ini, lahir berbagai budaya Islam berdasarkan realiti setempat yang mana corak dan hubungan gender juga berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Terdapat beberapa penyebab terjadinya ketimpangan gender. Diantaranya adalah faktor interpretasi agama dan budaya (Elfi Muawanah, 2006: 144). Konsep patriarki berbeda dengan patrilineal. Patrilineal diartikan sebagai budaya, dimana masyarakatnya mengikuti garis kaum laki-laki seperti anak bergaris keturunan ayah, sebagai contoh, Habsyah Khalik; Khalik adalah nama ayah dari Habsyah. Sementara patriarki memiliki makna lain yang secara harfiah berarti “kekuasaan bapak” (*role of the father*) atau “patriark” yang ditujukan untuk pelebelan sebuah

keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Secara terminologi kata patriarki digunakan untuk pemahaman kekuasaan kaum laki-laki, hubungan kekuasaan dengan apa mereka menguasai perempuan, serta sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara (Kamala Bashin, 1996: 29).

Lebih lanjut menurut Budhy Munawar Rachman, secara etimologi konsep tersebut berkaitan dengan sistem sosial, dimana seorang ayah menguasai semua anggota keluarganya, harta miliknya serta sumber-sumber ekonomi. Ia jugalah yang membuat semua keputusan penting dalam keluarga. Sistem berdasarkan patriarki ini biasanya mengasingkan perempuan di rumah, dengan demikian laki-laki lebih mampu menguasai kaum perempuan. Sementara itu pengasingan perempuan di rumah menjadikan perempuan tidak berdikari secara ekonomis, dan selanjutnya tergantung secara psikologi. Norma-norma moral, sosial dan hukum juga lebih banyak memberi hak kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan, karena alasan bahwa kaum laki-laki memang lebih bernilai secara publik daripada perempuan (Budhy Munawar Rachman, 1996: 394).

Dalam perkembangannya patriarki ini sekarang telah menjadi istilah terhadap semua sistem kekeluargaan maupun sosial, politik dan keagamaan yang dianggap merendahkan, bahkan menindas kaum perempuan mulai dari lingkungan rumah tangga sampailah masyarakat (Budhy Munawar Rachman, 1996: 394).

Sementara itu Ritzer dan Goodman memberi pandangan bahawa, ada empat tema yang menandai teori ketimpangan gender (George Ritzer and Douglas J. Goodman, 2003: 402). **Pertama**, laki-laki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tidak hanya berbeda, namun juga timpang tidak seimbang. Secara

spesifik, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk mengaktualisasikandiri lebih sedikit daripada kaum laki-laki yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan faktor sosial penting lainnya. **Kedua**, ketimpangan gender berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau keperibadian penting antara lelaki dan perempuan. **Ketiga**, walaupun manusia secara individual memiliki perbedaan ciri dan karakter satu sama lain, namun tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pengakuan akan ketimpangan gender berarti secara langsung menyatakan bahwa perempuan secara situasinya kurang berkuasa dibanding dengan kaum laki-laki untuk memenuhi keperluan mereka bersama laki-laki dalam rangka pengaktualisasian diri. **Keempat**, semua teori ketimpangan gender menganggap kaum laki-laki maupun perempuan akan menghadapi situasi dan struktur sosial yang semakin mengarah ke persamaan derajat (*egalitarian*) dengan mudah dan secara ilmiah. Dengan kata lain, mereka berkeyakinan akan adanya peluang untuk mengubah situasi.

Lebih lanjut menurut Siti Musdah Mulia terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan gender khususnya terhadap perempuan. **Pertama**, dominasi budaya patriarki. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan memiliki watak yang memihak kepada atau didominasi kepentingan laki-laki. **Kedua**, interpretasi ajaran agama sangat didominasi pandangan yang bias gender dan bias patriarki. **Ketiga**, hegemoni negara yang begitu dominan. Selaras dengan itu, beliau menyarankan agar dilakukan *counter ideology* dan *counter hegemony* (Siti

Musdah Mulia, 2007: 58-59). Pengaruh local terutamanya kebudayaan memainkan peranan yang penting dalam proses interaksi dengan Syariat Islam yang egalitarian. Peralihan pusat kuasa dari Hijaz ke kawasan yang masih kuat dengan fahaman patriarki mengubah dan mengurangkan hak-hak kaum perempuan dalam masyarakat (Nasaruddin Umar, 2001: 308).

Selain faktor-faktor tersebut, fenomena diskriminasi gender ini juga dianggap berasal daripada doktrin keagamaan, sama ada dalam agama samawi atau agama budaya, terutamanya melibatkan asal penciptaan perempuan dan penyingkiran Adam dan Hawa dari Syurga. Ia diakui oleh agama-agama samawi seperti Yahudi, Kristen dan sebahagian umat Islam. Menurut golongan feminis, faktor ini menjadi penyebab terhadap ketidakadilan dalam hubungan di antara laki-laki dan perempuan. Justru, sumber-sumber *Isra'iliyyat* atau mitos tersebut mempengaruhi sebahagian besar ulama klasik terutamanya dalam persepsi mereka terhadap kaum perempuan. Antara ayat al-Qur'an yang menyatakan tentang penciptaan perempuan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Nisa':

جَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا مِنْهُمَا وَخَلَقَ مِنْ حِدَّةٍ نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَزَقَكُمْ تَقْوَى النَّاسِ يَتَأْتِيهَا
وَنِسَاءً كَثِيرًا

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakan lelaki dan perempuan yang banyak. Al-Nisa'4:1

Dalam uraian penciptaan perempuan pertama dalam Islam, terdapat dua pandangan utama dalam kalangan *mufassirin*. Mayoritas ulama klasik berpendapat

perempuan diciptakan daripada tulang rusuk Adam a.s. Dengan kata lain, penciptaan perempuan berasal dari jenis yang satu yaitu Adam, dan tidak sama elemen penciptaannya dengan laki-laki. Antara kalangan ulama klasik termasuklah di antaranya al-Tabari (Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari, 2001: 341), al-Zamakhshari (Jar Allah Abi al-Qasim Mahmud, 1998: 5), Ibn Kathir ('Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il b. Kathir, t.t: 333), al-Alusi (Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi, t.t :209), al-Qurtubi (Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakr al-Qurtubi, 2006: 6), al-Suyuti (Jalal al-Din al-Suyuti, t.t: 209), dan kalangan ulama kontemporari seperti al-Buti (Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, 1993: 111-112), dan Hamka (Hamka, 1987: 174).

Pandangan jumbuh *mufassir* ini didukung oleh beberapa hadith Nabi SAW yang secara literalnya menggambarkan penciptaan tersebut.

Di antaranya sabda Nabi SAW

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنَّ
 ذَهَبَتْ تُفَيْمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Berwasiat lah kepada para perempuan. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang ada paling atas, jika kamu ingin meluruskan nya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu biarkan, maka tulang rusuk itu tetap bengkok, maka berwasiat lah kepada para perempuan dengan kebaikan. (Al-Bukhari, 4890).

Walaupun demikian, terdapat kumpulan minoritas dari kalangan ulama klasik dan kontemporer yang berpendapat, perempuan pertama tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebaliknya dari substans atau unsur yang sama. Diantara

ulama klasik adalah Abu Muslim (Abu Muslim al-Asfihani al-Khawalani, Namanya Ya‘qub b. ‘Auf. Salah seorang Tabi‘in yang thiqah. Abu Hasan‘Ali b.‘Umar al-Daruqutni, 1985: 280). Manakala dalam kalangan ulama kontemporer ialah Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Rida (Muhammad ‘Abduh & Muhammad Rasyid Rida, 1367 H: 331-332), Hasbi Ash-Shiddieqy (Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1995: 752), dan Quraish Shihab (Muhammad Quraish Shihab, 2001: 314). Walaupun tafsiran al-Qur’an bersifat polisemi, jika dilihat dan diamati mayoritas ulama *mufasirin* adalah lebih tepat, karena metodologi yang digunakan adalah berdasarkan *tafsir bi al-ma’thur* yaitu *tafsir al-Qur’an bi al-Sunnah*, .Ini karena penciptaan Hawa daripada tulang rusuk Adam, adalah bukti kekuasaan Allah SWT bukan simbol *inferiority* perempuan. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam menyebabkan kerendahan darjat perempuan adalah berasal dari pemikiran Barat (Gerda Lerner, 1986: 183). Walaupun dalam Bible jelas menceritakan kronologi proses penciptaan tersebut, mereka tidak percaya dan tidak menerima Bible sebagai wahyu Tuhan, sebaliknya dianggap sebagai kata-kata laki-laki yang berbau patriarki. Sehubungan dengan itu, ia perlu dinilai secara kritikal menggunakan pendekatan hermeneutic dan direkonstruksi pengungkapan (*articulation*) patriarki tersebut.

Golongan kedua menyatakan bahawa hadis yang menceritakan penciptaan perempuan daripada tulang rusuk tersebut perlu diuraikan secara metafora, bukan literal. Ini karena,ia akan memberi kesan terhadap tafsiran dan kepahaman hukum Islam. Menurut Rasyid Rida, pemahaman ini berkait dengan pengaruh penceritaan

Bible. Sekiranya tiada kisah seumpamanya dalam Bible, pasti tiada tafsiran mengenai penciptaan perempuan daripada rusuk laki-laki.

Akibat tafsiran ini sehingga menimbulkan berbagai bentuk hubungan gender dalam kalangan masyarakat Islam. Ada yang dilihat mempunyai hubungan yang baik seperti masyarakat zona Melayu, ada yang hubungan kurang baik seperti zona Arab dan ada yang tidak baik seperti di zona anak benua India.

Masyarakat Islam dikebanyakan kawasan, khususnya dalam aspek hubungan kekeluargaan dan kepemilikan harta, masih kuat mengamalkan adat dan istiadat lama. Terdapat hubungan yang kuat antara subordinasi perempuan dalam dunia Islam dengan tradisi dan budaya setempat (V.A. Mohamad Ashrof, 2005: 263). Dalam sebahagian masyarakat Muslim di benua India, janda tidak dibenarkan kawin lagi. Di Punjab dan Uttar Pradesh (India), perempuan Muslim tidak boleh mewarisi harta, tatkala masyarakat Mappila di Malabar (Kerala, India), mengamalkan tradisi pewarisan berdasarkan peraturan matrilineal (V.A. Mohamad Ashrof, 2005: 263). Sebahagian daripada amalan adat lain yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan adalah pembunuhan maruah (*honour killing*) di Timur Tengah (Honor Killing in a Cross-Cultural Context” dalam Unni Wikan *In Honor of Fadime: Murder and Shame*, 2008: 70), di Pakistan tradisi ini di istilahkan dengan *karo kari*, tradisi ini banyak berlaku di daerah Bolchistan dan Sindh (Iftikhar Haider Malik, 2005: 145), khitan anak perempuan yang keterlaluan di negara Afrika seperti Sudan dan Mesir, ujian keperawanan, *dowry death* atau *dowry murderer* juga di India (Veena Talwar Oldenburg, 1989: 222). Manakala di Arab Saudi, perempuan tidak dibenarkan

pemilu, membawa mobil, mempamerkan wajah atau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram di kalangan orang ramai (Veena Talwar Oldenburg, 1989: 222). Selain itu, dalam masyarakat kontemporari, lahir bentuk hubungan gender yang tidak mesra, contohnya dalam rumahtangga sering berlaku keganasan, penganiayaan fisik dan mental, pemukulan, pembunuhan, pemerkosaan dan gangguan seksual.

Sehubungan dengan keadaan sosial-budaya masyarakat Muslim yang dilihat tidak lagi berlandaskan panduan Nabi SAW, lahirnya golongan yang ingin membebaskan golongan yang tertindas di dalam masyarakat. Fenomena ini menjadi momentum kepada perjuangan feminisme. Kebanyakan golongan feminis sama, ada laki-laki atau perempuan lahir dari masyarakat yang tertindas, hususnya dari Timur Tengah dan kawasan Indo-Pakistan.

Di tinjau dari segi hukum fiqh juga terdapat sejumlah perbezaan hukum antara laki-laki dan perempuan (Sabir ‘Abd al-Rahman Ta‘imah, t.t: 165-168). Bagi sebahagian pegkaji, Perbezaan ini menggambarkan ketidakadilan gender kerana menempatkan kedudukan perempuan yang tidak sejajar dengan laki-laki (*bias gender*) (Khoiruddin Nasution, 2002: 83). Atas dasar perbezaan-perbezaan hukum tersebut, menimbulkan persoalan, adakah benar Islam tidak menjamin kesetaraan gender dan melebihkan kaum laki-laki daripada perempuan? Dan adakah kaum perempuan benar-benar mengalami bias gender? Jawabannya adalah, syariat Islam memberikan kesetaraan dalam bentuk keadilan yang sesuai dengan kemampuannya dan agama Islam tidak pernah bias terhadap perempuan bahkan mereka dimuliakan dan dilindungi oleh syariat Islam. Jika mereka

beranggapan bahawa ketidakadilan terdapat dalam ajaran agama maka anggapan itu adalah hasil kesalahan fahaman dalam menilai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dengan kata lain, ketidakadilan tersebut bukan dari ajaran keagamaan, Sebaliknya tradisi masyarakat setempat ataupun ia adalah amalan yang menyimpang (*deviant*) dari syariat Islam dan budaya tempatan.

Yusuf al-Qaradawi turut menegaskan bahawa perbezaan diantara laki-laki dan perempuan dalam sesetengah hukum tidak bermakna jenis laki-laki lebih mulia dan lebih hampir kedudukannya di sisi Allah SWT daripada jenis perempuan. Sebaliknya perbezaan ini berkehendakkan tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan fitrah setiap laki-laki dan perempuan (Nasr Salman & Su'ad Suthi (eds.), t.t. :574-577). Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi-Nya adalah mereka yang paling bertaqwa sama ada seorang laki-laki atau perempuan. Justru, untuk menyalahkan ajaran Islam sepenuhnya dalam ketimpangan hubungan gender dalam masyarakat Muslim adalah tidak wajar. Ini kerana pengaruh tradisi tempatan yang mengakar umbi dalam masyarakat Muslim tidak merefleksikan ajaran Islam yang sesungguhnya sebagaimana keteladanan Nabi SAW yang dekat dengan perempuan.

Selanjutnya isu kesetaraan, prinsip kesetaraan difahami oleh masyarakat umum sebagai, masing-masing mendapat sesuatu yang sama dalam jumlah yang sama. Namun kesetaraan gender dapat difahami sebagai laki-laki dan perempuan memainkan peran yang berbeda dalam keadaan yang harmoni (Ashari, 2009: 3). Peranan yang berbeda tidak menimbulkan masalah kerana ia adalah sunnah Allah yang menjadikan manusia sebagai saling lengkap- melengkapi untuk hidup

harmoni dalam masyarakat. Barat menganggap konsep kesetaraan gender berlaku apabila laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam acuan sosial yang sama, bergerak dalam kerangka acuan sosial yang satu, tinggal ditempat dan aturan yang satu, struktur anatomi fisik dan psikologi yang dianggap sama, dan masing-masing dibebani kewajiban yang sama serta memiliki hak yang sama (M. Sa'id Ramadhan Al-Buti, 2002: 106). Sedangkan dalam Islam jelas ini bukanlah konsep kesetaraan dan keadilan gender karena ia bertentangan dengan hukum alam. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia yang mempunyai sifat masing-masing (Paizah bt Ismail, 2003: 62).

Bukan saja daripada segi fisik dan psikologi malah berbeda dari segi kemampuan, bakat, keahlian dan karakteristik. Ini menandakan laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Komunitas manusia baik laki-laki atau perempuan, masing-masing ada kesamaan dari segi memikul tanggungjawab dan memiliki hak. Tidak semestinya mereka perlu mempunyai tanggungjawab dan hak yang sama. Masing-masing ada tanggungjawab yang perlu dipikul serta memiliki hak dalam segenap aspek kehidupan. Hak dan tanggungjawab ini berbeda, kemampuan bakat, karakteristik serta kedudukan masing-masing. Maka, kesetaraan gender berlaku dalam realitas kehidupan apabila laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki nilai kemanusiaan dan kemuliaan sebagai manusia serta mempunyai tanggungjawab dan hak. Manakala ketidaksamaan gender pula berlaku dalam realitas masyarakat manusia yang hidup dalam perbezaan yang ditentukan oleh Allah yang maha pencipta untuk mewujudkan keharmonian dalam kehidupan.

Namun demikian aliran feminisme yang dikenali sebagai Women's Liberation Movement, terus memperjuangkan hak kesamarataan antara laki-laki dan perempuan. Perjuangan ini bermula pada abad ke-18 dengan membuat pertambahan terhadap hak-hak perempuan termasuk tuntutan mereka adalah dengan membolehkan perempuan keluar untuk beraspirasi serta mengizinkan ide-ide perempuan di dalam pendidikan dan pekerjaan. Ini kerana, pada pertengahan tahun 1890-an masyarakat menganggap perempuan sebagai insan yang bertaraf lebih rendah daripada laki-laki dan tempat mereka hanya di rumah. Dengan demikian, di Eropa dan Amerika sangat mendukung Women's Liberation Movement (Pergerakan Pembebasan Wanita). Mereka mendakwa diri mereka sebagai kaum pejuang hak asasi wanita. Mereka juga menuduh bahawa ajaran dalam Islam turut menganiaya wanita khususnya dengan penetapan laki-laki sebagai pemimpin negara yang mempunyai kuasa penuh, autokratik dan tidak demokratik (Zulkifli Ahmad, t.t). Penafsiran secara literal mengenai beberapa ayat al-Qur'an dijadikan dasar tuduhan tersebut seperti yang terdapat dalam Surah al-Nisa' ayat 34 dan Surah al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut ini.

لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ۗ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمِ الرِّجَالِ
أَمْوَالَهُنَّ

Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.

Al-Nisa'4:34.

مَا لِبِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَ الَّذِي مِثْلُهُنَّ إِصْلَاحًا أَرَادُوا وَإِنْ ذَلِكَ فِي بَرِّدِهِنَّ أَحَقُّ وَيُعُولَتِهِنَّ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ذَرَجَةٌ عَلَيْهِنَ وَلِلرَّج

Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); Dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). dan (ingatlah), Allah maha kuasa, lagi maha bijaksana.

Al-Baqarah 2:228

Dilihat dari sudut penelitian yang dangkal, tentu sekali ayat-ayat al-Qur'an di atas boleh dijadikan pengukuhan kepada tanggapan bahwa Islam itu agama yang mendiskriminasi wanita secara terang-terangan. Namun, apa yang pasti selaku sistem cara hidup yang lengkap yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat melalui perutusan Rasulnya, ketetapan Islam di atas urusan kepemimpinan dalam sebuah rumahtangga sebenarnya dijalin begitu halus dan rapi untuk memastikan rumahtangga memainkan peranannya sebagai medan latihan praktikal institusi politik yang dasar (Zulkifli Ahmad, t.t).

Pola pemikiran feminis ini juga dipengaruhi oleh rasa tidak puas hati terhadap sistem patriarki yang wujud dalam sistem kekeluargaan yang mana kaum bapak diberikan tanggungjawab sepenuhnya terhadap nafkah keluarga. Tidak seperti kaum ibu yang lebih banyak dikurung dan dikhususkan untuk keperluan domestik saja. Oleh karena itu, mereka coba mendapatkan persamaan tugas sama seperti laki-laki sebagai pencari nafkah. Mereka juga menuntut laki-laki supaya terlibat dalam tugas domestic keluarga. Dalam usaha meneruskan lagi agenda

مُعَلَّقَةً فَتَذَرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُو أَفَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْ أَلَيْسَ بَيْنَ تَعَدُّ لَوْ أَنَّ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَارًّا وَتَتَّقُوا تُصَلِحُوا وَإِنْ كَال

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung dan jika kamu memperbaiki dan memelihara diri maka sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha mengasihani.

Al-Nisa'4: 129

Dalam hal ini, Yusuf al-Qardawi menolak dakwaan feminis barat dan menyatakan hujjah mereka itu tidak diterima. Menurut beliau, Islam menurunkan sesuatu syariat itu dengan menolak keburukan dan kemudaratan. Syariat Islam tidak mungkin dibina atas perkara yang membawa keburukan kepada manusia (Yusuf al-Qaradawi, 1996: 132-133). Ini berdasarkan kepada kaedah fiqh yang keempat yaitu (*al-dharar yuzal*). Setiap yang diharamkan syariat itu pasti ada keburukan nyata, dan apa yang diharuskan oleh syarak pasti ada kebaikan yang nyata. Misalnya dalam hal pengharaman arak:

نَفَعَهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ إِنَّكُمْ فِيهِمَا أَقْلٌ

Katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya

Al- Baqarah 2:219

Begitu jugalah dalam hal poligami, Islam mengharuskan poligami bukan saja menjauhkan keburukan zina malah memberi kebaikan kepada mereka agar terpelihara dalam sebuah keluarga. Sebaliknya undang-undang Barat tidak

membenarkan poligami tetapi membenarkan hidup sekedudukan terutama dengan wanita simpanan (Hj NorrodzohSiren, 2001: 139-141). Maka timbullah seks bebas yang boleh membawa AIDS dan penyakit kelamin yang lain serta berleluasalah kelahiran anak luar nikah. Anak-anak ini tentunya akan terlantar tanpa adanya ikatan keluarga yang terpelihara bahkan akan mewujudkan masyarakat yang rusak dalam keturunan (Hj NorrodzohSiren, 2001: 139-141).

Feminisme Barat turut menolak institusi perkahwinan terutamanya bagi perempuan yang ingin berkarir dan berkecimpung di bidang kemasyarakatan. Bagi golongan feminis Barat, perempuan moden perlu meninggalkan institusi perkawinan yang dianggap telah dicipta oleh budaya patriarki untuk menindas dan merangkap golongan perempuan agar menjadi hamba seks kepada kaum laki-laki. Apabila seseorang wanita berkahwin secara terpaksa, terlibat dalam aktivitas domestic tanpa diberikan sebarang bayaran. Ini berarti selain dari tugas biasa di kantor, perempuan juga terpaksa mengandung, melahirkan dan mendidik anak, di samping terpaksa melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga (Zaleha kamaruddin dan Raihanah Abdullah, 9-11) Sebagai gantinya, golongan wanita dianjurkan untuk menjadi perempuan berkarir sepenuh masa demi kemajuan diri dan wajar mengamalkan seks bebas tanpa adanya ikatan untuk memenuhi kebutuhan naluri kelamin mereka (Zeenath Kausar, 2001: 77-104).

Oleh karena itulah, masyarakat dunia perlu menyadari bahwa gerakan kaum feminis yang dibentuk pertama kali di negara-negara Barat ini adalah merupakan reaksi atas penindasan kaum perempuan di sana. Mereka yang merupakan penduduk mayoritas, merasa peran mereka di luar rumah sangat terhalang. Hak

mereka dalam aspek sosial diabaikan sama ada dalam masyarakat mahupun dalam keluarga. Ini jelas berbeda dengan kedudukan wanita yang diberi oleh Islam berhubung peran dan hak kaum perempuan sama ada dalam aspek keperibadian, aspek sosial, politik, ekonomi, pemilikan harta, perundangan, keluarga, dan sebagainya, kaum perempuan sangat dihargai sebagaimana kaum laki-laki. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita melainkan kerana wujudnya faktor-faktor tertentu seperti perbezaan kemampuan dan keadaan (Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, 21). Oleh kerana itu, untuk berhadapan dengan pandangan ini semua, golongan ilmuwan, ulama-ulama perlu mampu menonjolkan sifat dinamisme institusi perkawinan di dalam Islam, yang tidak hanya mementingkan keperluan materialis semata-mata bahkan turut menekankan kepentingan mewujudkan sebuah keluarga yang mampu melahirkan dan mendidik keturunan yang berakhlak mulia.

PENUTUP

Dalam perbincangan konsep gender terdapat dua isu utama. Pertama isu ketimpangan gender dan yang kedua isu kesetaraan gender. Penyebab terjadinya ketimpangan dan diskriminasi terhadap wanita atas dasar beberapa faktor di antaranya. dianggap doktrin ajaran keagamaan, faktor budaya patriarki, amalan budaya masyarakat dan faktor hegemoni negara.

Kedua isu kesetaraan, atas beberapa faktor di atas sehingga kaum feminis bangkit dan menyuarakan isu kesetaraan menuntut hak-hak mereka dengan atas

nama kesetaraan di bawah naungan gender menuntut kesetaraan antara lelaki dan wanita dalam segala bidang.

Namun islam sebagai Rahmatan lil 'alamin telah membawa kaum wanita kepada tempat yang sangat mulia sehingga wanita sama dalam bentuk ketaqwaan dan nilai ibadah di sisi Allah, walaupun terdapat beberapa perbedaan diantara laki-laki dan perempuan bukanlah atas faktor diskriminasi akan tetapi suatu kemuliaan dan bersifat adil yang bermaksud menempatkan sesuatu pada tempatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Kaherah: Dar Hajr, 2001).
- Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006).
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Bab al-Wusat bi al-Nisa, No. Hadis: 4890.
- Abu Muslim al-Asfihani al-Khawalani, Namanya Ya'qub b. 'Auf. Salah seorang Tabi'in yang thiqah.
- Abu Hasan'Ali b. 'Umar al-Daruqutni *Dhikr Asma' al-Tabi'in* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, (1985).
- Anna Paterson, edisi revisi, Chicago, Illinois: University of Chicago Press,; Suad Joseph *et al.* (2008).
- Ashari, *Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Megawangi Study Komparasi Pemikiran Dua Tokoh*, (Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009).
- Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta:Paramadina, 1996).
- Elfi Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender* (Malang: Kutub Minar, 2006).

- George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, (Terjemahan) *Teori Sosiologi Modern*, Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Gerda Lerner *The Creation of Patriarchy* (New York: Oxford University Press, (1986).
- Honor Killing in a Cross-Cultural Context” dalam Unni Wikan *In Honor of Fadime: Murder and Shame* (terj.)
- Hamka *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987).
- Iftikhar Haider Malik *Culture and Customs of Pakistan* (Connecticut: Greenwood Press, 2005).
- ‘Imad al-Din Abi al-Fida’ Isma‘il b. Kathir *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim* (Mesir: Mu’assasah Qurtubah, t.t).
- Jar Allah Abi al-Qasim Mahmud. ‘Umar al-Zamakhsyarial-*Kasyyaf*, (Riyadh: Maktabah al-‘Abikan, 1998).
- Jalal al-Din al-Suyutial-*Durr al-Manthur fi Tafsir bi al-Ma’tthur* (Kaherah: Dar Hajr, t.t).
- Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 1993).
- Kamus Dewan Edisi Keempat* (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005).
- Kamala Bashin, *What is Patriarchy*, Diterjemahkan oleh Nursyahbani Katjasungkana “*Menggugat Patriarki*” (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996)
21. Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Academia, 2002).
- Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti *al-Islam Malaz Kull al-Mujtama‘at al-Insan: Limaza wa Kayfa?* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 1993).
- Muhammad ‘Abduh & Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Dar al-Manar, 1367H).
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’an al- Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lantera Hati, 2001) .

- M. Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Perempuan: Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin (terj.). (Karangsem: Era Intermedia, 2002).
- Nasr Salman & Su'ad Suthi (eds.), *Fatawa al-Nisa' li Ashab al-Fadilah Yusuf al-Qaradawi, wa Mahmud Syaltut, wa 'Abd al-Halim Mahmud, wa Muhammad Mutawalli Sya'rawi wa Ahmad Hamani* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.t.).
- Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. (Jakarta: Paramadina, 2001), 308.
- Norrodzoh Siren, *Islam dan Isu-Isu Semasa Dalam Tamadun Islam Dan Tamadun Asia*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2001).
- Oxford University Press, Ranjana Kumari *Brides Are Not for Burning: Dowry Victims in India*. (New Delhi: Radiant, 1989).
- Paizah bt Ismail, *Status Wanita Dalam Islam: Antara Prinsip Syariah dan Ijtihad Fuqaha*, *Jurnal Syariah* (Kuala Lumpur, 2003).
- Raymond J. Corsini *The Dictionary of Psychology*. (Philadelphia: Psychology Press, 1999).
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).
- Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi *Ruh al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t).
- Sabir 'Abd al-Rahman Ta'imah *al-Mar'ah al-Muslimah: Bayna Ghara'iz al-Basyar wa Hidayah al-Islam* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.t.).
- Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah *Al-Quran dan terjemah nya*, (Jakarta, 1997).
- Yusuf al-Qaradawi, *Markaz al-Mar'ah fi Al-Hayat Al-Islamiah*, (t.tp, 1996).
- V.A. Mohamad Ashrof, *Islam and Gender Justice: Questions at the Interface* (Delhi: Kalpaz Publications, 2005).
- Veena Talwar Oldenburg *Dowry Murder: The Imperial Origins of a Cultural Crime*. New York USA.

Zulkifli Ahmad, *Hak & Tanggungjawab Gender Menurut Perspektif Islam, Risalah kepemimpinan Siri3* (t.t.p.: Jemaah Islam Malaysia, 2000).

Zulkifli Ahmad, *hak dan Tanggungjawab Gender Menurut Prespektif Islam*.

Zeenath Kausar, *Feminist Sexual Politicis and Family Deconstruction: An Islamic perspective*.(Kuala lumpur: t.p., 2001)